



---

**PKM KECAMATAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK  
BERBASIS SAIBA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE PROPINSI  
SULAWESI SELATAN**

Oleh  
Asri Kunda  
Universitas Dipa  
E-mail: [kundaasri@yahoo.com](mailto:kundaasri@yahoo.com)

---

**Article History:**

Received: 15-02-2022

Revised: 26-02-2022

Accepted: 20-03-2022

**Keywords:**

Saiba, Sektor Public, Akrual  
Basic

**Abstract:** Kegiatan pengabdian ini didasari pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan Sektor Publik di tingkat desa, khususnya di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Implementasi undang-undang dana desa menjadi tantangan bagi SDM di pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Fokus kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan kapasitas aparat Desa di Kecamatan Tanete Riattang pada bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan Berbasis SAIBA melalui program pelatihan intensif dan pendampingan dengan tujuan pendalaman tentang proses pengelolaan keuangan. Target peserta kegiatan pengabdian ini adalah seluruh personil aparat Desa Kecamatan Tanete Riattang. Hasil pendampingan berupa pembuatan video sebagai alat transparansi pengelolaan keuangan desa, pendampingan ke badan usaha milik desa sebagai solusi peningkatan kapasitas keuangan desa, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa.

---

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan digunakan oleh berbagai macam pihak termasuk pemerintah. Sektor pemerintah (publik) menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertanggung jawaban mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan dan tujuan instansi. Diharapkan dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bisa digunakan dan dikelola dengan baik oleh instansi untuk menambah kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Laporan keuangan sektor pemerintah juga harus disusun menggunakan standar/dasar tertentu. Standar/dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Pada awalnya standar akuntansi pemerintah berbasis kas (*cash basis*) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991 yang mensyaratkan basis akuntansi untuk sektor pemerintah adalah *cash basis*. Perkembangan zaman menyebabkan semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi



pemerintah semakin meningkat. Praktek sistem akuntansi pemerintah dikembangkan bukan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban saja, tetapi juga harus dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, evaluasi pelaksanaan serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu penggunaan *accrual basis* dianggap lebih mencerminkan kondisi sebuah entitas. Sistem *accrual basis* mencatat semua kejadian/transaksi pada saat transaksi itu terjadi, sehingga memungkinkan melihat adanya potensi arus kas masuk dan keluar walaupun uang/kas belum diterima atau dibayarkan. Sedangkan sistem *cash basis* mencatat kejadian/transaksi ketika arus kas masuk dan keluar telah dilakukan (diterima/dibayarkan). Sistem *cash basis* dianggap kurang bisa menampilkan informasi, oleh karena itu dimulailah Reformasi Keuangan Negara.

Di era otonomi daerah, Kelurahan merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik. Masalah yang dihadapi aparatur kelurahan adalah minimnya tingkat keterampilan aparatur kelurahan dengan tuntutan masyarakat yang lebih dinamis. Minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur Kelurahan dalam penguasaan sistem pengelolaan keuangan yang mengacu pada aturan yang ada, Laporan keuangan dibuat atas dasar kerjasama dengan pihak ke tiga, hal ini menyebabkan bertambahnya biaya setiap periode laporan keuangan sebagai biaya pembuatan laporan keuangan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di kecamatan Tanete Riattang akan memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan workshop penggunaan software penyusunan laporan keuangan sektor publik agar bisa mengefisienkan biaya pembuatan laporan keuangan. Melaksanakan pelatihan penyusunan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan dan desa, untuk menyusun laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.

Kecamatan Tanete Riattang adalah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan berjarak 174 km dari Kota Makassar Ibukotanya adalah Tanete Riattang. Secara geografis wilayah Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4013'- 5006' Lintang Selatan dan antara 119042'-120040' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Kondisi Demografis. Kecamatan Tanete Riattang sebagai pusat pemerintahan di kabupaten Bone merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 20,97 jiwa/Ha. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 12.427 KK, dengan jumlah penduduk 49.887 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang tercatat 2.379 Ha (0,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone) dengan luas area terbangun 701,38 Ha yang meliputi 24 kelurahan. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone khususnya lima tahun terakhir (tahun 2014- 2018) menunjukkan angka 2,72 % pertahun. Proyeksi



penduduk untuk 5 Tahun kedepan tahun 2023 diprediksikan penduduk Kabupaten Bone mencapai 763.412 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,67 jiwa/Ha. (Bone dalam angka).

Kondisi Keuangan Daerah, Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan pada Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki dari masing-masing sumber pendapatan. Target Pendapatan Kabupaten Bone ditargetkan sebesar Rp.100.116.236.500,00 dan telah dapat terealisasi sekitar Rp. 52.347.928.041,42 atau sekitar 52 %. Tahun 2018 realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.064.893.051,68 dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 374.353.042.835,00. Realisasi belanja langsung tersebut yang teralokasikan untuk belanja sektor sanitasi pada tahun 2018 sebesar Rp.1.965.866.700,00 yang meliputi pendanaan investasi sanitasi sebesar Rp.1.565.866.700,00 dan biaya pemeliharaan/ operasional sebesar Rp. 400.000.000,00. Penganggaran daerah dalam APBD untuk sektor sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai pada akhir Tahun 2018 realisasi belanja sanitasi sebesar Rp. 1.965.866.700,00, namun porsi belanja sektor sanitasi relatif masih kecil jika dibandingkan dengan anggaran belanja sektor lainnya, presentase anggaran belanja langsung sanitasi untuk tahun 2018 sebesar 0,26% dari total belanja langsung sebesar Rp.374.353.042.835,00.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 nilai PDRB Kabupaten Bone sebesar Rp. 6.412.649,41 dan dari tahun ke tahun terus meningkat hingga pada tahun 2012 nilai PDRB Bone sebesar Rp. 10.372.888,85. Nilai PDRB Kabupaten Bone tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 8,01 persen dari angka ini memperlihatkan bahwa sumbangan Kabupaten Bone terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan masih relatif kecil. Namun demikian kontribusi PDRB Kabupaten Bone setiap tahunnya terus meningkat.

Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Bone untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan tatanan pengelolaan tata ruang wilayah lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah, maka kebijakan penataan ruang wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan
- b. Pengembangan prasarana wilayah
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- f. Pengembangan potensi pariwisata
- g. Pengembangan potensi pertambangan
- h. Pengembangan potensi industri
- i. Pengembangan potensi perdagangan



- j. Pengembangan potensi pendidikan
- k. Pengembangan potensi permukiman
- l. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- m. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, beberapa kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) oleh Pemerintah Kabupaten Bone yaitu Kota Watampone kecamatan Tanete riattang yang potensial dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata budaya.

Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari wilayah Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang Barat. Dimana Kecamatan Tanete Riattang itu sendiri merupakan Ibukota Kabupaten, menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Bone. Kami melihat dari segi penataan administrasi terutama pembuatan Laporan keuangan di 24 (dua puluh empat) Desa dan Kelurahan belum menunjukkan kondisi yang menguntungkan. Pembuatan laporan keuangan di hampir semua Desa dan Kelurahan dipercayakan pada pihak ke tiga, hal ini terjadi dikarenakan minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah dan tidak tersedianya software sebagai aplikasi penyusunan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA.

Pada awalnya standar akuntansi pemerintah berbasis kas (*cash basis*) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991 yang mensyaratkan basis akuntansi untuk sektor pemerintah adalah *cash basis*. Perkembangan zaman menyebabkan semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi pemerintah semakin meningkat. Praktek sistem akuntansi pemerintah dikembangkan bukan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban saja, tetapi juga harus dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, evaluasi pelaksanaan serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu penggunaan *accrual basis* dianggap lebih mencerminkan kondisi sebuah entitas. Sistem *accrual basis* mencatat semua kejadian/transaksi pada saat transaksi itu terjadi, sehingga memungkinkan melihat adanya potensi arus kas masuk dan keluar walaupun uang/kas belum diterima atau dibayarkan. Sedangkan sistem *cash basis* mencatat kejadian/transaksi ketika arus kas masuk dan keluar telah dilakukan (diterima/dibayarkan). Sistem *cash basis* dianggap kurang bisa menampilkan informasi, oleh karena itu dimulailah Reformasi Keuangan Negara .

Reformasi Keuangan Negara menjadi titik awal timbulnya permasalahan mengenai pembuatan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA di Kecamatan Tanete Riattang secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sumber daya untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan sangat terbatas. Keterbatasan tenaga di Kelurahan dan Desa dibandingkan dengan volume pekerjaan yang dihadapi sehingga mengganggu efektivitas hasil pekerjaan. Minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur Kelurahan dan Desa. Tidak tersedianya software untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik. Laporan Keuangan Desa dan Kelurahan dibuat atas bantuan pihak ke tiga sehingga cenderung menambah biaya yang sudah ada.

Berdasarkan survey awal PKM, berhasil diidentifikasi permasalahan di kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Desa dan Kelurahan dibuat atas bantuan pihak ke tiga sehingga cenderung menambah biaya yang sudah ada.



2. Tidak tersedianya software untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik.
3. Minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan dan Desa.

Tiga permasalahan yang ada fokus pengabdian pada permasalahan ke dua tidak tersedianya software untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik. Hal ini merupakan hal paling mendasar dan segera harus ada penanganan. Pembuatan laporan keuangan dengan system lama akan membuat penyelesaian laporan menjadi lama dan hasilnya tentu saja tidak maksimal. Permasalahan tersebut akan diatasi dengan meng-adakan software sebagai aplikasi untuk membuat laporan keuangan sektor publik pada setiap periode pelaporan. Kemudian masalah yang ke tiga, setelah software/aplikasi untuk pembuatan laporan keuangan sudah ada, maka perlu sumber daya yang handal dan kreatif untuk membuat fungsi aplikasi tersebut berjalan. Untuk itu aparatur pemerintah yang akan menjalankan atau menggunakan aplikasi tersebut perlu dibekali kemampuan untuk kepentingan hal tersebut. Permasalahan tersebut akan diatasi dengan melakukan workshop, pelatihan penyusunan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA dengan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan.

## METODE

### A. Sasaran Kegiatan

Proses penyusunan laporan keuangan dimulai dari analisis transaksi, pencatatan (jurnal), pemosting, pembuatan buku besar, pembuatan neraca saldo, penyesuaian, hingga akhirnya penyusunan laporan keuangan. Pengguna (*users*) harus bisa memastikan bahwa sistem telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga memproses dan menghasilkan informasi yang relevan. Laporan keuangan ada 5 jenis, yaitu laporan rugi. Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Proses yang panjang tersebut menyebabkan pembuat laporan keuangan harus memiliki kapabilitas dan integritas dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi bisa membantu untuk mengurangi kesalahan yang ditimbulkan akibat ketidaktepatan dan ketidakmampuan seseorang dalam menyusun laporan keuangan. Adanya sistem informasi (aplikasi/*software*) akan memudahkan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Resiko salah ketik, kesalahan penjumlahan, kesalahan klasifikasi akun bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi tersebut yang nantinya informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan valid. Informasi yang valid membuat pengambilan keputusan menjadi tidak bias.

Penggunaan aplikasi juga digunakan dalam sektor pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Sebuah sistem juga diperlukan di sektor pemerintahan, karena instansi harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dalam rangka pelayanan kepada publik. Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya. Aplikasi yang digunakan



dalam proses penyusunan laporan keuangan instansi adalah aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal).

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) untuk penyusunan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA akan dipusatkan di Kecamatan Rittang. Kecamatan Tanete Rittang akan menjadi pusat tempat pelatihan dengan mengundang 24 kelurahan dan Desa sebagai peserta. Dari 24 peserta ini nanti kemudian akan melakukan pendampingan di kecamatan yang lainnya . Jadi Khalayak sasaran yang dipilih ada 24 aparat Desa dan Kelurahan Kecamatan Tanete Riattang . Mereka dipilih dengan pertimbangan bahwa posisi kecamatan Tanete Riattang sebagai mitra merupakan Ibukota Kabupaten Bone. Dengan workshop dan pelatihan yang akan diberikan, diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAIBA dan juga membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi/software yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

## B. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Pelatihan penyusunan laporan keuangan sektor publik dan Workshop pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi/software berbasis SAIBA dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberikan wawasan mengenai bentuk dan tehnik penyusunan laporan keuangan. Pentingnya memahami sistematika penyusunan laporan keuangan untuk laporan keuangan sektor pemerintah. Penggunaan aplikasi juga digunakan dalam sektor pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Sebuah sistem juga diperlukan di sektor pemerintahan, karena instansi harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan dalam rangka pelayanan kepada publik. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

### 2. Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta pelatihan diberikan materi tentang penyusunan laporan keuangan, meliputi: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca serta laporan arus kas. Materi ini disampaikan dalam bentuk tutorial disertai dengan latihan/studi kasus.

### 3. Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang dialami dalam penyusunan laporan keuangan di Desa dan Kelurahan masing - masing. Setiap peserta Pelatihan diperkenankan untuk membahas permasalahan yang terjadi di Desa dan Kelurahan masing-masing, mendapatkan solusi terlebih lagi menjadi pengalaman bagi peserta pelatihan lainnya dari Desa dan Kelurahan yang berbeda.

Disamping langkah 1, 2, dan 3 di atas, akan dilakukan kegiatan pendampingan



untuk menyusun laporan keuangan selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi.

## HASIL

Kegiatan Pengabdian ini dievaluasi melalui hasil penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Aparatur Desa dan Kelurahan yang berkompeten untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyusunan laporan keuangan dan penggunaan software, yang akan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Selain itu, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah pelatihan, tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini juga dapat diketahui. Berikut ini disajikan tabel hasil evaluasi program pengabdian ini.

Evaluasi kegiatan PKM

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolok Ukur
Peserta mampu menyusun laporan keuangan sektor publik setiap periodenya	Pengetahuan tentang Penyusunan laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA	Peserta memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan pemerintah
Peserta mampu membuat laporan keuangan dengan aplikasi/software	Pengetahuan penggunaan software untuk penyusunan laporan keuangan sektor pemerintah.	Laporan keuangan yang disusun dapat menjadi model laporan keuangan untuk Desa dan Kelurahan yang lainnya.
Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan aparatur kelurahan dan desa.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan dan desa.	Peserta mampu memberikan pelayanan maksimal dengan biaya minimal mengenai system informasi keuangan pemerintah.

## DISKUSI

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Secara keseluruhan, target luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM adalah adanya peningkatan keterampilan dan profesionalisme masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sektor Publik berbasis SAIBA sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan biaya yang minimal. Mampu



memenuhi tuntutan tugas sebagai aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Kepala Kecamatan Tanete Riattang dengan Tim Pengabdian Masyarakat. Permasalahan yang diselesaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat focus pada 3 (tiga) permasalahan. Permasalahan yang disepakati berdasarkan hasil diskusi dengan pihak kecamatan tanete riattang yaitu:

1. Laporan Keuangan Desa dan Kelurahan dibuat atas bantuan pihak ke tiga sehingga cenderung menambah biaya yang sudah ada.
2. Tidak tersedianya software untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik.
3. Minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan dan Desa.

Solusi permasalahan yang dilakukan Tim PKM Dalam Menyelesaikan Permasalahan Mitra

No	Permasalahan	Solusi	Indikator capaian
1	Laporan Keuangan Desa dan Kelurahan dibuat atas bantuan pihak ke tiga sehingga cenderung menambah biaya yang sudah ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop pengelolaan laporan keuangan Sektor Publik.</li> <li>2. Penyediaan software penyusunan laporan keuangan sektor publik.</li> <li>3. Penyediaan sapsas (computer PC)</li> </ol>	Laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA
2	Tidak tersedianya software untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014.</li> <li>2. Penyediaan software laporan keuangan sektor publik.</li> <li>3. Penyediaan sapsas (computer PC)</li> </ol>	Meningkatnya kemampuan keterampilan aparatur kelurahan dan desa.
3	Minimnya kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan dan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan penggunaan software laporan keuangan sektor publik.</li> <li>2. Monev aplikasi software penyusunan laporan keuangan sektor publik</li> </ol>	Pelayanan prima dengan biaya yang minimal.



## Implementasi

luaran dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini sebagai berikut :

1. Seluruh Kelurahan dan Desa yang ada di Tanete Riattang bisa membuat Laporan Keuangannya sendiri. Penyusunan Laporan Keuangan tidak lagi dipercayakan kepada pihak ke tiga.
2. Seluruh Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Tanete Riattang bisa membuat laporan keuangan sektor publik berbasis SAIBA.
3. Tertatanya sistem informasi keuangan diseluruh Desa dan Kelurahan di kecamatan Tanete Riattang.

## KESIMPULAN

Permasalahan yang dialami oleh Desa yang ada di Kecamatan Tanete Riattang yaitu kurangnya media transparansi pengelolaan keuangan, pemahaman aparat desa terkait dengan kebijakan dan praktik pengelolaan dan manajemen keuangan Desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi solusi permasalahan tersebut. Kegiatan dilakukan dimulai dengan kegiatan survei awal pemetaan masalah, pelatihan, dan pendampingan. Kegiatan pelatihan diharapkan meningkatkan pemahaman aparat desa dan akan meningkatkan kualitas proses pengelolaan keuangan di Desa kecamatan Tanete Rittang menjadi lebih baik. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk pembuatan media transparansi seperti video, penyusunan laporan keuangan dan manajemen pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, risiko dan potensi kerugian finansial yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalisasi oleh Pemerintah Desa Kecamatan Tanete Riattang.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Kecamatan Tanete Rittang diharapkan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Kesuksesan program ini dapat digunakan oleh tim pengabdian lain untuk dijadikan model pengabdian di daerah lain.

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini tidak dapat penulis laksanakan tanpa bantuan serta dukungan dari pihak lain yang telah membantu baik materil maupun moril. Oleh karena itu ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Andi Kumala Dewi Salahuddin, S.STP.,M.Si. Camat Tanete Rittang yang memberikan ijin dan memfasilitasi tim untuk melakukan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tanete Rittang Kabupaten Bone.
2. Nuryadin Muhammadiyah, S.Sos.,M.M. selaku Lurah Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kab Bone, yang sudah bersedia menyediakan tempat pelatihan untuk pelaksanaan PKM.
3. Bapak/Ibu Pengawai Kelurahan Watampone yang sudah ikut membantu suksesnya pelaksanaan PKM di Kecamatan Tanete Rittang Kab Bone.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014. PMK-270/PMK.05/2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat.
- [2] Gheorghe C. F., Nicolae P. V., Dorel. 2018. Characterization of Accounting System of Community Operators of Publik Utilities Services. Procedia - Social and Behavioral Sciences 62 ( 2018 ) 114 – 121
- [3] Yuesti Anik, 2020, Akuntansi Sektor Publik, CV.Noah Aletheia, Badung Bali